

**SKRIPSI PERANCANGAN
KAMPUNG TUNAWISMA DENGAN KONSEP PEMBERDAYAAN
EKONOMI DI MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

SYAHRUL HIDAYAT SULAEMAN

D511 16 504



DEPARTEMEN ARSITEKTUR

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

GOWA

2021

**SKRIPSI PERANCANGAN
KAMPUNG TUNAWISMA DENGAN KONSEP PEMBERDAYAAN
EKONOMI DI MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

SYAHRUL HIDAYAT SULAEMAN

D511 16 504



DEPARTEMEN ARSITEKTUR

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

GOWA

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**KAMPUNG TUNAWISMA DENGAN KONSEP PEMBERDAYAAN EKONOMI DI
MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

Syahrul Hidayat Sulaeman
D511 16 504

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi
Program Sarjana Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin
pada tanggal 24 Nopember 2021

Menyetujui

Pembimbing I

Hj. Nurmaida Amri, ST., MT
NIP. 19671218 199512 2 001

Pembimbing II

Dr. Ir. H. Samsuddin Amin, MT
NIP. 19661231 199403 1 022

Mengetahui

Ketua Program Studi Arsitektur



Dr. Ir. H. Edward Syarif, MT.
NIP. 19690612 199802 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Syahrul Hidayat Sulaeman

NIM : D51116504

Program Studi : Arsitektur

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

KAMPUNG TUNAWISMA DENGAN KONSEP PEMBERDAYAAN EKONOMI DI MAKASSAR

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain dan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 November 2021

Yang Menyatakan



Syahrul Hidayat Sulaeman

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Perancangan Tugas Akhir dengan judul “***Kampung Tunawisma Dengan Konsep Pemberdayaan Ekonomi di Makassar***” dalam Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Shalawat dan Salam tak lupa penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW yang menjadi Suri Tauladan untuk kita umat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan Skripsi Perancangan Tugas Akhir ini masih terdapat berbagai kekurangan yang belum sempat terkoreksi mengingat keterbatasan waktu, fasilitas dan kapasitas penulis. Penulis tetap mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna perbaikan selanjutnya.

Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih, yaitu kepada :

1. Ayah **Ir. H. Sulaeman** dan Ibu **Dra. Hj. Suriani, Apt.** serta saudara-saudara saya **Sulvian Hasmi** dan **Zulfadli Fauzi** yang telah memberikan limpahan kasih sayang, perhatian, dukungan, doa dan pengertian dalam perjalanan menggapai cita-cita.
2. Bapak **Dr. Edward Syarif, ST., MT.** selaku Ketua Departemen Teknik Arsitektur Universitas Hasanuddin Periode 2020/2021 – 2025/2026
3. Ibu **Hj. Nurmaida Amri, ST., MT.** selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak **Dr. Ir. H. Samsuddin Amin, MT.** selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan, ilmu, dan saran kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu **Dr. Ir. Hj. Nurul Nadjmi** selaku Penasehat Akademik.
5. Ibu **Dr. Ir. Hj. Idawarni J. Asmal** selaku Kepala Labo Perancangan Perumahan dan Lingkungan Permukiman.
6. **Seluruh Dosen dan Staf** Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan memberikan ilmunya selama penulis belajar di Jurusan Arsitektur Universitas Hasanuddin.

7. Teman-teman **Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur 2016** terkhusus **PREZIZI16** yang telah memberikan motivasi, keceriaan, kenangan, dan semangat.
8. Terima kasih untuk **Nanda Putri Faturachma** yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan bantuan selama ini.
9. Serta seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Skripsi Perancangan Tugas Akhir ini.

Dengan teriring doa yang tulus, ungkapan terima kasih yang tak terhingga dan menyadari sepenuhnya akan keterbatasan Skripsi Perancangan Tugas Akhir ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan yang berarti untuk perbaikan di masa mendatang, karena kami sadar bahwa Tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan.

Akhir kata, semoga Skripsi Perancangan Tugas Akhir ini dapat membawa manfaat yang banyak bagi semua pihak, dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-NYA dalam segala aktivitas keseharian kita dan menilainya sebagai suatu amal ibadah di sisi-NYA. Amin Ya Robbal Alamin.

Gowa, 2 November 2021

Syahrul Hidayat Sulaeman

Nim. D511 16 504

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
1. Non Arsitektural.....	4
2. Arsitektural	4
C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan	4
1. Tujuan	4
2. Sasaran Pembahasan	5
D. Lingkup Pembahasan	5
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum Tentang Kampung	6
1. Pengertian Kampung.....	6
2. Penataan Kampung	7
3. Karakteristik Kampung.....	7

4. Unsur Kampung	8
5. Tipologi Kampung	8
B. Tinjauan Umum Tentang Tunawisma (Gelandangan dan Pengemis)	13
1. Pengertian Tunawisma	13
2. Penyebab Lahirnya Gelandangan dan Pengemis	15
3. Karakteristik Gelandangan dan Pengemis	15
C. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan	16
1. Pengertian Pembinaan	16
2. Bentuk Pembinaan	17
3. Program Pembinaan	17
D. Tinjauan Umum Tentang Pemberdayaan Ekonomi	21
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi	21
2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi	22
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	23

BAB III

METODE PERANCANGAN	29
A. Metode Pembahasan	29
B. Waktu Pembahasan	29
C. Metode Pengumpulan Data	29
1. Survei Lapangan	29
2. Studi Pustaka	29
D. Teknik Analisis Data	30
E. Studi Banding	30
1. Kampung Topeng, Malang	30
2. Kampung Lawas Maspati, Surabaya	33
3. Desa Penglipuran, Bali	38
F. Kesimpulan Studi Banding	43

G. Skema Perancangan	46
----------------------------	----

BAB IV

ANALISIS PERANCANGAN	47
-----------------------------------	-----------

A. Gambaran Umum Wilayah Makassar	47
---	----

1. Letak Geografis Kota Makassar	47
--	----

2. Data Penduduk Kota Makassar	48
--------------------------------------	----

3. Tujuan Penataan Kota Makassar	49
--	----

4. Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Makassar	49
--	----

5. Estimasi Perhitungan Kapasitas Kampung Tunawisma di Makassar	50
---	----

B. Analisis Dasar Perancangan Makro	55
---	----

1. Analisis Lokasi Perancangan	55
--------------------------------------	----

2. Analisis <i>Site</i> Perancangan	60
---	----

C. Analisis Dasar Perancangan Mikro	61
---	----

1. Analisis Aktivitas	61
-----------------------------	----

2. Analisis Kebutuhan Ruang	63
-----------------------------------	----

3. Analisis Pola Hubungan Ruang Mikro	72
---	----

4. Analisis Besaran Ruang	77
---------------------------------	----

5. Luasan <i>Site</i> Perancangan	88
---	----

D. Analisis Rancangan Fisik Arsitektural	89
--	----

1. Analisis Bentuk Bangunan	89
-----------------------------------	----

2. Analisis Tata Ruang Dalam (<i>Interior</i>)	89
--	----

3. Analisis Tata Ruang Luar (<i>Exterior</i>)	89
---	----

4. Analisis Sistem Struktur	89
-----------------------------------	----

5. Analisis Sistem Penghawaan	90
-------------------------------------	----

6. Analisis Sistem Pencahayaan	91
--------------------------------------	----

7. Analisis Sistem Komunikasi	91
-------------------------------------	----

8. Analisis Sistem Penjaringan Air Bersih	92
---	----

9. Analisis Sistem Pembuangan Air Kotor	92
10. Analisis Sistem Kelistrikan	92
11. Analisis Sistem Pengamanan Terhadap Kebakaran	93
12. Analisis Sistem Pembuangan Sampah	94

BAB V

KONSEP PERANCANGAN.....95

A. Konsep Pemilihan Lokasi	95
----------------------------------	----

B. Konsep Pemilihan <i>Site</i> Perancangan	100
---	-----

C. Analisis Tapak	103
-------------------------	-----

1. Rona Awal Tapak	103
--------------------------	-----

2. Orientasi Matahari	104
-----------------------------	-----

3. Sirkulasi Tapak	105
--------------------------	-----

4. Arah Hembusan Angin	106
------------------------------	-----

5. <i>View</i> ke Dalam	108
-------------------------------	-----

6. <i>View</i> ke Luar	110
------------------------------	-----

7. Tingkat Kebisingan	111
-----------------------------	-----

8. <i>Zoning</i> Tapak	113
------------------------------	-----

9. Pola Penataan Massa	114
------------------------------	-----

10. Rencana <i>Layout</i> Tapak	115
---------------------------------------	-----

11. <i>Block Plan</i>	116
-----------------------------	-----

D. Konsep Dasar Fisik Bangunan	117
--------------------------------------	-----

1. Konsep Dasar Gubahan Bentuk	117
--------------------------------------	-----

2. Konsep Sistem Struktur	117
---------------------------------	-----

3. Konsep Lansekap	122
--------------------------	-----

4. Konsep <i>Interior</i>	123
---------------------------------	-----

1. Sistem Pengkondisian Bangunan	124
--	-----

2. Sistem Utilitas Bangunan	126
-----------------------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA.....	133
LAMPIRAN.....	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kampung Topeng Malang.....	30
Gambar 3.2 Pintu Gerbang Kampung Topeng	31
Gambar 3.3 Salah Satu Tembok Paud yang dapat dijadikan spot <i>selfie</i>	32
Gambar 3.4 Warung Kopi yang dahulunya adalah markas perang.....	33
Gambar 3.5 Tanaman Toga milik warga kampung Lawas	34
Gambar 3.6 Mural 3D yang dibuat oleh warga Kampung Lawas	35
Gambar 3.7 Peta Kampung Lawas Maspati.....	35
Gambar 3.8 Peta Desa Penglipuran.....	38
Gambar 3.9 Orientasi Utara-Selatan dan Barat-Timur Desa Penglipuran.....	39
Gambar 3.10 Pembagian Tata Ruang Desa Penglipuran	41
Gambar 3.11 Skema Perancangan	46
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Makassar	47
Gambar 4.2 Alternatif Lokasi Perancangan.....	56
Gambar 4.3 Peta Kecamatan Tamalate.....	57
Gambar 4.4 Peta Kecamatan Manggala Kota Makassar.....	58
Gambar 4.5 Peta Kecamatan Biringkanaya	59
Gambar 4.6 Pola Hubungan Ruang Mikro Unit Hunian Rumah.....	72
Gambar 4.7 Pola Hubungan Ruang Mikro Unit Hunian Wisma/Barak.....	72
Gambar 4.8 Pola Hubungan Ruang Mikro Fasilitas Pembinaan	73
Gambar 4.9 Pola Hubungan Ruang Mikro Kantor Pengelolah.....	73
Gambar 4.10 Pola Hubungan Ruang Mikro Fasilitas Kantin	73
Gambar 4.11 Pola Hubungan Ruang Mikro Fasilitas Mesjid	74
Gambar 4.12 Pola Hubungan Ruang Mikro Fasilitas Aula Serbaguna	74
Gambar 4.13 Pola Hubungan Ruang Mikro Fasilitas <i>Workshop</i> Tata Rias.....	74
Gambar 4.14 Pola Hubungan Ruang Mikro Fasilitas <i>Workshop</i> Tata Busana	75
Gambar 4.15 Pola Hubungan Ruang Mikro Fasilitas <i>Workshop</i> Tata Boga	75
Gambar 4.16 Pola Hubungan Ruang Mikro Fasilitas <i>Workshop</i> Meubel.....	75
Gambar 4.17 Pola Hubungan Ruang Mikro Fasilitas <i>Workshop</i> Perbengkelan ...	76
Gambar 4.18 Pola Hubungan Ruang Mikro Fasilitas <i>Workshop</i> Las	76
Gambar 4.19 Pola Hubungan Ruang Mikro Fasilitas Aktivitas Ruang Luar	76
Gambar 5.1 Alternatif Lokasi Perancangan.....	95

Gambar 5.2 Peta Administrasi Kecamatan Tamalate	97
Gambar 5.3 Alternatif Site Perancangan.....	100
Gambar 5.4 Letak Geografis <i>Site</i> Perancangan	102
Gambar 5.5 Posisi <i>Site</i> Perancangan terhadap Sarana Lingkungan.....	103
Gambar 5.6 Kondisi Rona Awal Tapak.....	103
Gambar 5.7 Analisis Orientasi Matahari.....	104
Gambar 5.8 Konsep Penanganan Sinar matahari.....	105
Gambar 5.9 Analisa Sirkulasi Tapak	106
Gambar 5.10 Konsep Sirkulasi Tapak	106
Gambar 5.11 Analisis Arah Hembusan Angin	107
Gambar 5.12 Respon Penghalang Laju Angin.....	107
Gambar 5.13 Respon untuk Penghawaan Alami	108
Gambar 5.14 Analisa <i>View</i> ke Dalam Tapak	109
Gambar 5.15 Respon dari Analisa <i>View</i> ke Dalam Tapak.....	109
Gambar 5.16 Analisa <i>View</i> ke Luar Tapak	110
Gambar 5.17 Respon dari <i>View</i> ke Luar Tapak.....	111
Gambar 5.18 Analisa Kebisingan	112
Gambar 5.19 Respon Reduksi Kebisingan	112
Gambar 5.20 Penzoningan Kawasan Kampung Tunawisma.....	113
Gambar 5.21 Pola Penataan Massa Bangunan.....	114
Gambar 5.22 Rencana <i>Layout</i> Tapak.....	115
Gambar 5.23 <i>Block Plan</i>	116
Gambar 5.24 Konsep Bentuk.....	117
Gambar 5.25 Pondasi Umpak	119
Gambar 5.26 Pondasi Batu Kali Menerus.....	119
Gambar 5.27 Pondasi Telapak (<i>Footplat</i>).....	120
Gambar 5.28 Sistem Rangka Beton Bertulang dan Rangka Kayu.....	121
Gambar 5.29 Rangka Atap Kayu dan Baja Ringan	121
Gambar 5.30 Elemen <i>Softscape</i> pada Lansekap	122
Gambar 5.31 Elemen <i>Hardscape</i> pada Lansekap	122
Gambar 5.32 Konsep <i>Interior</i>	123

Gambar 5.33 Skema Pencahayaan Alami dan Bukaannya Jendela Lebar untuk Pencahayaan Buatan yang Maksimal.....	124
Gambar 5.34 Penggunaan Pencahayaan Buatan.....	125
Gambar 5.35 Sistem <i>Cross Ventilation</i>	126
Gambar 5.36 Skema Distribusi Air Bersih.....	127
Gambar 5.37 Skema Distribusi Air Kotor.....	127
Gambar 5.38 Penerapan Lubang Biopori.....	128
Gambar 5.39 Skema Sistem Jaringan Listrik.....	128
Gambar 5.40 Penggunaan <i>Speaker</i> sebagai sistem Komunikasi.....	129
Gambar 5.41 <i>Ramp</i> dan Tangga sebagai Transportasi dalam Bangunan.....	129
Gambar 5.42 Skema Sistem Pembuangan Sampah.....	130
Gambar 5.43 Pos Jaga.....	131
Gambar 5.44 Sistem APAR dan Sistem pilar <i>Hydrant</i>	131
Gambar 5.45 Sistem Penangkal Petir <i>Franklin</i>	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data jumlah Gelandangan di Makassar	3
Tabel 3.1 Perbandingan Studi Banding Kawasan Kampung	43
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2019.....	48
Tabel 4.2 Data Kondisi UMKM di Kota Makassar Tahun 2017-2018	50
Tabel 4.3 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sulawesi Selatan	50
Tabel 4.4 Jumlah Penyandang Tunawisma di Kota Makassar.....	51
Tabel 4.5 Jumlah Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Jenis Kelamin Yayasan Mitra Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	52
Tabel 4.6 Jumlah Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Tingkatan Umur Yayasan Mitra Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	52
Tabel 4.7 Asumsi Jumlah Pengelola Kampung Tunawisma di Makassar	54
Tabel 4.8 Asumsi Jumlah Peminat Pelatihan Keterampilan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
Tabel 4.9 Jumlah Rumah Tangga, Penduduk, Luas, dan Kepadatan Penduduk Kota Makassar Tahun 2018	60
Tabel 4.10 Kebutuhan Ruang untuk Unit Hunian Rumah.....	63
Tabel 4.11 Kebutuhan Ruang untuk Unit Hunian Wisma/Barak	63
Tabel 4.12 Kebutuhan Ruang Pembinaan untuk Warga Usia Remaja	64
Tabel 4.13 Kebutuhan Ruang Pembinaan untuk Warga Usia Dewasa	64
Tabel 4.14 Kebutuhan Ruang untuk Pembina/ Pengelola pada Fasilitas Pembinaan.....	64
Tabel 4.15 Kebutuhan Ruang untuk Pengelola pada Kantor Pengelola	65
Tabel 4.16 Kebutuhan Ruang untuk Pengunjung pada Kantor Pengelola.....	65
Tabel 4.17 Kebutuhan Ruang untuk Warga Kampung ada Kantor Pengelola.....	65
Tabel 4.18 Kebutuhan Ruang untuk Pengelola pada Fasilitas Kantin.....	66
Tabel 4.19 Kebutuhan Ruang untuk Warga & Pengunjung pada Fasilitas Kantin.....	66
Tabel 4.20 Kebutuhan Ruang untuk Pengelola pada Fasilitas Masjid.....	67

Tabel 4.21 Kebutuhan Ruang untuk Warga & Pengunjung pada Fasilitas Masjid	67
Tabel 4.22 Kebutuhan Ruang untuk Pengelola pada Fasilitas Aula Serbaguna ...	67
Tabel 4.23 Kebutuhan Ruang untuk Warga & Pengunjung pada Fasilitas Aula Serbaguna.....	68
Tabel 4.24 Kebutuhan Ruang untuk Pengelola pada Workshop Tata Rias	68
Tabel 4.25 Kebutuhan Ruang untuk Warga pada Workshop Tata Rias	68
Tabel 4.26 Kebutuhan Ruang untuk Pengelola pada Workshop Tata Busana.....	69
Tabel 4.27 Kebutuhan Ruang untuk Warga pada <i>Workshop</i> Tata Busana	69
Tabel 4.28 Kebutuhan Ruang untuk Pengelolah pada <i>Workshop</i> Tata Boga	69
Tabel 4.29 Kebutuhan Ruang untuk Warga pada <i>Workshop</i> Tata Boga	70
Tabel 4.30 Kebutuhan Ruang untuk Pengelolah pada <i>Workshop</i> Meubel.....	70
Tabel 4.31 Kebutuhan Ruang untuk Warga pada <i>Workshop</i> Meubel.....	70
Tabel 4.32 Kebutuhan Ruang untuk Pengelolah pada <i>Workshop</i> Perbengkelan ..	71
Tabel 4.33 Kebutuhan Ruang untuk Warga pada <i>Workshop</i> Perbengkelan	71
Tabel 4.34 Kebutuhan Ruang untuk Pengelolah pada <i>Workshop</i> Las.....	71
Tabel 4.35 Kebutuhan Ruang untuk Warga pada <i>Workshop</i> Las	72
Tabel 4.36 Standar Sirkulasi Ruang.....	77
Tabel 4.37 Besaran Ruang Unit Hunian Rumah.....	78
Tabel 4.38 Besaran Ruang Unit Hunian Wisma/Barak	79
Tabel 4.39 Besaran Ruang Unit Fasilitas Pembinaan.....	80
Tabel 4.40 Besaran Ruang Unit Kantor Pengelola	80
Tabel 4.41 Besaran Ruang Unit Fasilitas Kantin.....	81
Tabel 4.42 Besaran Ruang Fasilitas Masjid.....	82
Tabel 4.43 Besaran Ruang Fasilitas Aula Serbaguna	83
Tabel 4.44 Besaran Ruang <i>Workshop</i> Tata Rias.....	84
Tabel 4.45 Besaran Ruang <i>Workshop</i> Tata Busana	84
Tabel 4.46 Besaran Ruang <i>Workshop</i> Boga	85
Tabel 4.47 Besaran Ruang <i>Workshop</i> Meubel.....	85
Tabel 4.48 Besaran Ruang <i>Workshop</i> Perbengkelan	86
Tabel 4.49 Besaran Ruang <i>Workshop</i> Las	86
Tabel 4.50 Besaran Ruang Fasilitas untuk Aktivitas Ruang Luar	87

Tabel 4.51 Besaran Ruang Kebutuhan Parkir Kendaraan.....	87
Tabel 5.1 Mekanisme Pemilihan Lokasi dengan Sistem Bobot dan Nilai.....	96
Tabel 5.2 Letak Kelurahan pada Kecamatan Tamalate	98
Tabel 5.3 Perbandingan Jumlah Penduduk Kecamatan Tamalate berdasarkan Jenis Kelamin.....	98
Tabel 5.4 Luas dan Ketinggian Permukaan Laut Kelurahan di Kecamatan Tamalate.....	99
Tabel 5.5 Mekanisme Pemilihan <i>Site</i> dengan Sistem Bobot dan Nilai.....	101

ABSTRAK

Penanganan tunawisma di Indonesia merupakan persoalan yang cukup krusial. Maraknya tunawisma menimbulkan ketidakaturan sosial yang ditandai dengan kesemrawutan, ketidaknyamanan dan ketidaktertiban serta mengganggu keindahan kota. Permasalahan tunawisma timbul akibat akumulasi dari berbagai permasalahan seperti halnya kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya. Di Kota Makassar terjadi peningkatan dan penurunan jumlah tunawisma yang terjaring tiap tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan wadah untuk menampung aktivitas hunian serta pembinaan pada bidang yang termasuk sangat berpengaruh bagi tunawisma yaitu pemberdayaan ekonomi. Perancangan Kampung Tunawisma dengan Konsep Pemberdayaan Ekonomi menjadi wadah bagi para tunawisma yang terjaring untuk mendapatkan fasilitas yang layak didukung dengan pembinaan yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi yang nantinya dapat memberikan pengaruh terhadap pekerjaan dan pendapatan para tunawisma yang dibina. Konsep perancangan yang diterapkan disesuaikan dengan lokasi perancangan mengadopsi bentuk bangunan rumah adat Bugis Makassar serta pola penataan massa *cluster* (berkelompok) sesuai dengan kebiasaan tunawisma yang berkelompok.

Kata Kunci: *Kampung, Tunawisma, Pemberdayaan Ekonomi, Makassar*

ABSTRACT

Handling the homeless in Indonesia is a crucial issue. The rise of homelessness causes social disorder which is characterized by chaos, discomfort and disorder and disturbs the beauty of the city. The problem of homelessness arises as a result of the accumulation of various problems such as poverty, low education, lack of work skills, socio-cultural, health and so on. In Makassar City there is an increase and decrease in the number of homeless people who are netted every year. Therefore, a forum is needed to accommodate residential activities and coaching in areas that are very influential for the homeless, namely economic empowerment. The design of the Homeless Village with the Concept of Economic Empowerment becomes a forum for the homeless who are netted to get proper facilities supported by guidance that is focused on economic empowerment which can later have an influence on the work and income of the homeless who are fostered. The design concept applied is adjusted to the design location, adopting the shape of the Bugis Makassar traditional house building and the pattern of structuring the cluster mass according to the habits of the homeless in groups.

Keyword: *Village, Homeless, Economic Empowerment, Makassar*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan masyarakat merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembangunan Indonesia. Maka dari itu, segala aspek yang menyangkut kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia harus diperlakukan dengan adil dan seimbang. Termasuk masalah-masalah sosial yang menghambat terciptanya kesejahteraan dan pembangunan masyarakat Indonesia.

Masalah-masalah sosial tersebut merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar adat istiadat masyarakat. Masalah sosial disebut dengan situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan banyak orang (Kartini Kartono, 2005: 6). Dalam menghadapi masalah-masalah yang dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan harus diadakan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Salah satu masalah yang menghambat pembangunan pada saat ini adalah masalah penanganan tuna wisma dan tuna susila atau disebut gelandangan (Soedjono, 1989: 15). Gelandangan terdapat di hampir semua kota-kota besar, yang merupakan masalah serius dalam suatu pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

Pengemis dan gelandangan adalah persoalan yang cukup krusial di Indonesia. Maka dari itu, Pembinaan terhadap pengemis dan gelandangan sangat penting dilakukan. Berikut tujuan dilakukannya pembinaan terhadap pengemis dan gelandangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar:

1. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketenteraman masyarakat
2. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati
3. Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam

mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat

4. Menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat
5. Meningkatkan ketertiban dalam bermasyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai
6. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Menurut laporan dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2016 jumlah gelandangan mencapai 89.149 jiwa. Sedangkan pengemis mencapai 147.019. Bahkan, dikatakan bahwa Indonesia termasuk dalam 7 negara dengan jumlah tunawisma terbanyak di dunia (liputan6.com,2015). Maraknya gelandangan dan pengemis karena telah tersingkir atau kalah dalam persaingan era urbanisasi yang mensyaratkan ketrampilan tertentu.

Permasalahan gelandangan merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti halnya kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh para gelandangan adalah munculnya ketidakteraturan sosial yang ditandai dengan kesemrawutan. Ketidaknyamanan dan ketidaktertiban serta mengganggu keindahan kota. Realitas masyarakat lapisan bawah ini merupakan golongan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tertentu, tempat tinggal ataupun relasi-relasi yang dapat mengangkat kehidupan mereka. Mereka acap kali dianggap penyebab keresahan dan kerusuhan, sampah masyarakat, pengacau dan perusak kota, selain itu mereka jarang diperhitungkan bahkan tidak dianggap dalam kehidupan sosial masyarakat (Nurhidayati, 2016).

Gelandangan di kota Makassar mengalami peningkatan jumlah. Adapun jumlah gelandangan yang terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Makassar dalam setiap tahunnya adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data jumlah Gelandangan di Makassar

No.	Tahun	Jumlah
1.	2015	436
2.	2016	727
3.	2017	726
4.	2018	344
5.	2019	470
Total		2.703

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar, 2019

Hal ini sesuai dengan dengan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Makassar jumlah gelandangan pada tahun 2015 adalah 436, tahun 2016 mengalami peningkatan pesat menjadi 727, dan pada tahun 2017 menjadi 726, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 344 dan tahun 2019 kembali naik menjadi 470 orang. Tetapi itu belum semua gelandangan di Makassar yang terdata karena pada saat penjaringan masih banyak gelandangan yang belum tertangkap, karena ada beberapa gelandangan yang sembunyi saat razia dilakukan.

Berdasarkan fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan terhadap anak terlantar yang tercantum pada Perda Kota Makassar No.2 tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar. Namun, kenyataan yang ada pemerintah belum mampu merealisasikan Undang-Undang tersebut.

Perancangan Kampung Tunawisma dengan Konsep Pemberdayaan dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan pemahaman serta keterampilan yang nantinya dapat memberikan pengaruh terhadap pekerjaan

dan pendapatan para tunawisma yang dibina. Oleh karena itu, dalam perancangan Kampung Tunawisma ini dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi dengan pertimbangan hal tersebut merupakan hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh para tunawisma.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh beberapa masalah adalah sebagai berikut:

1. Non Arsitektural

Bagaimana membangun tatanan kehidupan yang baik di lingkungan Kampung Tunawisma sehingga diharapkan dengan adanya kampung ini para penghuni mampu menjadi lebih mandiri dan memiliki keterampilan sebagai aset untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih baik?

2. Arsitektural

- a. Bagaimana merencanakan Kampung untuk Tunawisma yang dapat menunjang seluruh kegiatan pengguna nya?
- b. Bagaimana penataan bangunan Kampung Tunawisma di Makassar agar menjadi satu kesatuan dengan permukiman di sekitarnya?

C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan

1. Tujuan

a. Non Arsitektural

Membangun Tatanan kehidupan yang baik di lingkungan Kampung Tunawisma sehingga para tunawisma yang dibina mampu menjadi lebih mandiri dan memiliki keterampilan masing-masing sebagai aset untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih baik nantinya.

b. Arsitektural

- 1) Menyusun konsep perancangan sebagai landasan konseptual dalam merancang Kawasan Kampung Tunawisma di Makassar yang dapat menunjang seluruh kegiatan pengguna nya.
- 2) Merancang sebuah Kampung Tunawisma di Makassar dengan penataan bangunan yang menjadi satu kesatuan dengan permukiman di sekitarnya.

2. Sasaran Pembahasan

a. Non Arsitektural

Mengetahui konsep, teori, standar dan aturan yang dibutuhkan untuk merancang sebuah Kampung untuk Tunawisma dengan Konsep Pemberdayaan Ekonomi di Makassar.

b. Arsitektural

Menghasilkan Konsep perancangan Kampung Tunawisma dengan Konsep Pemberdayaan Ekonomi di Makassar yang ideal dan memenuhi tuntutan serta persyaratan kampung yang sesuai dengan fungsinya.

D. Lingkup Pembahasan

1. Pembahasan ditinjau dari disiplin ilmu arsitektur yang berkaitan dengan Kawasan Kampung Tunawisma.
2. Pembahasan diarahkan pada pembahasan arsitektural yang merupakan alternatif rancangan, perancangan tapak, tata fisik, dan kebutuhan ruang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan yang memaparkan latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metode dan sistematika pembahasan.
- Bab II Tinjauan pustaka mengenai Kampung dan Tunawisma, dan studi literatur.
- Bab III Konsep dasar perancangan Kampung Tunawisma di Makassar.
- Bab IV Bab ini berisi tentang analisis terhadap hal – hal yang terkait dengan perencanaan dan perancangan kampung tunawisma yang mencakup analisis kegiatan dan ruang, analisis fisika bangunan, analisis sistem utilitas, analisis site, dan analisis visual bentuk bangunan.
- Bab V Bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai hal-hal yang akan dijadikan sebagai konsep dasar acuan dalam merancang Kampung Tunawisma. Dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai konsep dasar perancangan Kampung Tunawisma yang selanjutnya digunakan sebagai acuan perancangan fisik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kampung

1. Pengertian Kampung

Kampung memiliki pengertian yaitu suatu kesatuan lingkungan tempat tinggal yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang terdiri dari kesatuan keluarga-keluarga. Kumpulan sejumlah kampung disebut desa. Kampung adalah satu-satunya jenis permukiman yang bisa menampung golongan penduduk Indonesia yang tingkat perekonomian dan tingkat pendidikan paling rendah meskipun tidak tertutup bagi penduduk berpenghasilan dan berpendidikan tinggi (Khudori, 2002).

Kampung masih merupakan satuan teritorial dan sosial terkecil dalam sistem administrasi dan kemasyarakatan Indonesia sehingga setiap kampung memiliki organisasi sosial yang dibentuk oleh warga kampung tersebut yang mengatur dan mengawasi tata tertib kemasyarakatan warga kampung yang bersangkutan.

Berikut merupakan definisi kampung menurut beberapa ahli:

Kampung merupakan lingkungan tradisional khas Indonesia, ditandai ciri kehidupan yang terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat (Herbasuki, 1984: 112).

Kampung merupakan bentuk permukiman yang unik, tidak dapat disamakan dengan 'slum' dan 'squater' atau juga disamakan dengan permukiman penduduk berpenghasilan rendah (Baros, 1980 : 23).

Menurut Lukman Ali et, al. (1995: 438), Kampung memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Kelompok rumah yang merupakan bagian kota (biasanya dihuni orang berpenghasilan rendah).
- b. Desa: dusun;
- c. Kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu, dibawah Kecamatan;

- d. Terbelakang (belum modern), berkaitan dengan kebiasaan kampung; kolot.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa kampung adalah suatu lingkungan permukiman yang khas Indonesia yang memiliki ciri antara lain, penduduk masih membawa sifat kekeluargaan yang erat, memiliki kepadatan bangunan dan penduduk yang tinggi, serta kondisi fisik bangunan yang kurang baik dan tidak beraturan.

2. Penataan Kampung

Menurut Lukman Ali et, al. (1995: 1014), penataan memiliki arti proses, cara, perbuatan menata: penyusunan.

Program perbaikan kampung pada awalnya merupakan program perbaikan kondisi lingkungan fisik di tengah kota, dan secara bertahap diharapkan masyarakat akan memperbaiki rumahnya masing-masing. Program perbaikan kampung di Indonesia dimulai di Jakarta dan Surabaya pada tahun 1960-an. Program tersebut di Jakarta terkenal dengan nama Proyek Muhammad Husni Thamrin dan di Surabaya dikenal dengan nama Proyek WR Supratman (Dharmodjo, 1999: 2).

Komponen-komponen yang diutamakan dalam perbaikan fisik dan lingkungan di kampung terdiri dari empat jenis, yaitu (Dharmodjo, 1999: 6):

- a. Jalan setapak dengan lebar 0,5 m – 1 m dan secara konstruktif tidak dapat dilalui kendaraan.
- b. Selokan dengan lebar 0,1 m – 0,25 m.
- c. Persampahan seperti bak sampah dan gerobak.
- d. MCK umum.

3. Karakteristik Kampung

Dalam buku Raharjo (1999) yang berjudul Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, dijabarkan dari beberapa pendapat bahwa masyarakat desa/kampung memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Besarnya kelompok primer
- b. Faktor geografik yang menentukan sebagai dasar pembentukan kelompok/asosiasi
- c. Hubungan lebih bersifat intim dan awet
- d. Homogen
- e. Mobilitas sosial rendah
- f. Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi
- g. Populasi anak dalam proporsi yang lebih besar.

Prinsip dari kampung merupakan kesatuan masyarakat kecil yang dilengkapi dengan alat-alat memenuhi kebutuhannya sendiri. Daerah kampung harus kecil sehingga semua bagian-bagiannya dapat mudah dicapai dengan berjalan kaki tetapi cukup luas untuk dapat melayani sendiri keperluan-keperluan pokok masyarakatnya, misalnya sekolah dan pasar.

4. Unsur Kampung

Menurut Bintarto (1983: 14) Unsur-unsur dari kampung meliputi:

- a. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.
- b. Penduduk, Hal yang meliputi jumlah pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk kampung setempat.
- c. Tata Kehidupan, Tata kehidupan dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga kampung maupun menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat kampung (*rural society*). Ketiganya merupakan suatu kesatuan hidup atau *living* unit.

5. Tipologi Kampung

- a. Tipologi Kampung/Desa Berdasarkan Sistem Ikatan Kekerabatan

Berdasarkan ciri-ciri fisik desa dalam sistem kehidupan masyarakat, maka terbentuk ikatan-ikatan kekerabatan di dalam wilayah pemukiman penduduk. Setidaknya ada tiga sistem ikatan kekerabatan yang membentuk tipe-tipe desa di Indonesia, yakni:

1) Tipe Kampung Geneologis,

Suatu kampung yang ditempati oleh sejumlah penduduk dimana masyarakatnya mempunyai ikatan secara keturunan atau masih mempunyai hubungan pertalian darah. Desa yang terbentuk secara geneologis dapat dibedakan atas tipe patrilineal, matrilineal, dan campuran.

2) Tipe Kampung Teritorial,

Suatu kampung yang ditempati sejumlah penduduk atas dasar suka rela. Desa teritorial terbentuk menjadi tempat pemukiman penduduk berdasarkan kepentingan bersama, dengan demikian mereka tinggal di suatu desa yang menjadi suatu masyarakat hukum dimana ikatan warganya didasarkan atas ikatan daerah, tempat atau wilayah tertentu.

3) Tipe Kampung Campuran,

Suatu kampung dimana penduduknya mempunyai ikatan keturunan dan wilayah. Dalam bentuk ini, ikatan darah dan ikatan wilayah sama kuatnya.

b. Tipologi kampung/desa Berdasarkan Hamparan Tempat Tinggal

Berdasarkan hamparan tempat tinggal, maka desa dapat diklasifikasikan atas:

1) Kampung/desa Pedalaman

Kampung/desa yang tersebar di berbagai pelosok yang jauh dari kehidupan kota. Suasana ideal desa pedalaman pada umumnya lebih diwarnai dengan nuansa kedamaian, yaitu kehidupan sederhana, sunyi, sepi dalam lingkungan alam yang bersahabat.

2) Kampung/desa Pegunungan

Kampung/desa Terdapat di daerah pegunungan, Pemusatan tersebut didorong kegotongroyongan penduduknya. Pertambahan penduduk memekarkan desa pegunungan itu ke segala arah, tanpa rencana. Pusat- pusat kegiatan penduduk bergeser mengikuti pemekaran desa.

3) Kampung/Desa Dataran Tinggi

Kampung/desa yang berada di daerah pegunungan. Permukiman penduduk di sini umumnya memanjang sejajar dengan jalan raya yang menembus desa tsb. Jika desa mekar secara alami, tanah pertanian di luar desa sepanjang jalan raya menjadi permukiman baru. Ada kalanya pemekaran ke arah dalam (di belakang permukiman lama). Lalu dibuat jalan raya mengelilingi desa (*ring road*) agar permukiman baru tak terpencil.

4) Kampung/desa Dataran Rendah

Kampung yang letaknya berada di dataran rendah dan mata pencaharian dari desa dataran rendah biasanya bergantung pada sektor pertanian.

5) Kampung/desa Pesisir Pantai

Kampung yang berada di daerah pantai yang landai. dapat tumbuh permukiman yang berrmatapencarian di bidang perikanan, perkebunan kelapa dan perdagangan. Perluasan desa pantai itu dengan cara menyambung sepanjang pesisir, sampai bertemu dengan desa pantai lainnya. Pusat-pusat kegiatan industri kecil (perikanan, pertanian) tetap dipertahankan di dekat tempat tinggal semula.

c. Tipologi Kampung Berdasarkan Pola Pemukiman

Soekandar Wiriaatmadja (1972) membagi pola pemukiman di perkampungan ke dalam empat pola, yakni:

1) Pola Permukiman Menyebar

Rumah-rumah para petani tersebar berjauhan satu sama lain. Pola ini terjadi karena belum adanya jalan-jalan besar, sedangkan orang-orang harus mengerjakan tanahnya secara terus menerus. Dengan demikian, orang-orang tersebut terpaksa harus bertempat tinggal di dalam lahan mereka.

2) Pola Permukiman Memanjang

Bentuk pemukiman yang terlentak di sepanjang jalan raya atau di sepanjang sungai, sedangkan tanah pertaniannya berada di belakang rumahnya masing-masing.

3) Pola Permukiman Berkumpul

Bentuk pemukiman di mana rumah-rumah penduduk berkumpul dalam sebuah kampung, sedangkan tanah pertaniannya berada di luar kampung.

4) Pola Permukiman Melingkar

Bentuk pemukiman di mana rumah-rumah penduduk melingkar mengikuti tepi jalan, sedangkan tanah pertaniannya berada di belakangnya.

d. Tipologi Desa/Kampung berdasarkan Keegiatannya

Tipe desa berdasarkan kegiatannya dapat dikelompokkan menjadi:

1) Desa Agrobisnis

adalah desa yang berorientasi pada sektor pertanian terutama pada sektor perdagangan produk hasil pertanian tersebut.

2) Desa Agroindustri

adalah desa yang berorientasi pada sektor pertanian terutama dalam bidang industri pertanian tersebut, baik dari segi teknologi pertanian maupun yang lainnya.

3) Desa Pariwisata

adalah desa yang berada di suatu daerah pariwisata dan mata pencaharian serta keseharian dari masyarakat desa tersebut sangat bergantung dari usaha yang mengandalkan sektor pariwisata dari desa tersebut.

4) Desa non Pertanian

adalah desa yang di dalam lingkungan desa tersebut tidak ada lagi terlaksana kegiatan pertanian, melainkan usaha usaha yang dilakukan oleh masyarakat penduduk yang tinggal di desa tersebut yaitu berusaha bekerja diluar sektor pertanian. Contohnya dengan berdagang.

e. Tipologi Kampung Berdasarkan Perkembangannya

Berdasarkan perkembangannya, tipe kampung di Indonesia terbagi atas empat tipe, yakni:

1) Pra Kampung (Kampung Tradisional)

Tipe kampung semacam ini pada umumnya dijumpai dalam kehidupan masyarakat adat terpencil, dimana seluruh kehidupan masyarakatnya termasuk teknologi bercocok tanam, cara memelihara kesehatan, cara makan dan sebagainya masih sangat tergantung pada alam sekeliling mereka. Tipe desa seperti ini cenderung bersifat sporadis dan sementara.

2) Kampung Swadaya (kampung terbelakang)

Suatu wilayah kampung dimana masyarakat sebagian besar memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Desa ini umumnya terpencil dan masyarakatnya jarang berhubungan dengan masyarakat luar, sehingga proses kemajuannya sangat lamban karena kurang berinteraksi dengan wilayah lain atau bahkan tidak sama sekali.

Ciri-ciri Kampung swadaya:

- a) Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya.
- b) Penduduknya jarang.
- c) Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris.
- d) Bersifat tertutup.
- e) Masyarakat memegang teguh adat.
- f) Teknologi masih rendah.
- g) Sarana dan prasarana sangat kurang.
- h) Hubungan antarmanusia sangat erat.
- i) Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

3) Kampung Swakarya (Kampung sedang berkembang)

Keadaannya sudah lebih maju dibandingkan kampung swakarya, dimana masyarakatnya sudah mampu menjual kelebihan hasil produksi ke daerah lain disamping untuk memenuhi

kebutuhan sendiri. Interaksi sudah mulai nampak, walaupun intensitasnya belum terlalu sering. Ciri-ciri kampung swakarya:

- a) Adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir.
 - b) Masyarakat sudah mulai terlepas dari adat.
 - c) Produktivitas mulai meningkat.
 - d) Sarana prasarana mulai meningkat.
 - e) Adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir.
- 4) Kampung Swasembada (Desa maju)

Kampung yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal. Hal ini ditandai dengan kemampuan masyarakatnya untuk mengadakan interaksi dengan masyarakat luar, melakukan tukar-menukar barang dengan wilayah lain (fungsi perdagangan) dan kemampuan untuk saling mempengaruhi dengan penduduk di wilayah lain. Dari hasil interaksi tersebut, masyarakat dapat menyerap teknologi baru untuk memanfaatkan sumber dayanya sehingga proses pembangunan berjalan dengan baik. Ciri-ciri kampung swasembada adalah berikut:

- a) Hubungan antarmanusia bersifat rasional.
- b) Mata pencaharian homogen.
- c) Teknologi dan pendidikan tinggi.
- d) Produktifitas tinggi.
- e) Terlepas dari adat.
- f) Sarana dan prasarana lengkap dan *modern*.

B. Tinjauan Umum Tentang Tunawisma (Gelandangan dan Pengemis)

1. Pengertian Tunawisma

Tunawisma adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebagai pembatas wilayah dan milik pribadi, tunawisma sering

menggunakan lembaran kardus, lembaran seng atau aluminium, lembaran plastik, selimut, kereta dorong pasar swalayan, atau tenda sesuai dengan keadaan geografis dan negara tempat tunawisma berada.

Orang yang mempunyai tradisi tinggal di dalam tenda seperti di Mongolia tidak bisa dikatakan tunawisma. Di negara-negara maju, ada orang yang memutuskan menjadi tunawisma bukan karena kemiskinan atau tidak memiliki uang, tetapi ingin bebas dari keluarga atau tanggung jawab. Di Amerika Serikat, industrialis Howard Hughes pernah untuk sementara memutuskan untuk menjadi tuna wisma. Sewaktu Perang Vietnam anak muda Amerika Serikat dengan sengaja berkeinginan jadi tunawisma, karena orang tanpa alamat yang jelas tidak menerima surat undangan wajib militer.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen, Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan dan/atau di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian gelandangan dan pengemis, yaitu: gelandangan adalah “orang yang tidak punya tempat tinggal tetap, tidak tentu pekerjaannya,

berkeliruan, mondar-mandir kesana-sini, tidak tentu tujuannya, bertualang”. Berikutnya, pengemis adalah “orang yang meminta- minta”.

2. Penyebab Lahirnya Gelandangan dan Pengemis

Menurut para ahli sosial, penyebab adanya gelandangan dan pengemis serta anak jalanan disebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Namun secara detail dapat dijelaskan bahwa keberadaan gepeng dan anjal disebabkan terjadinya kemiskinan lokal secara kultural maupun struktural. (Mardiyati, 2015).

Menurut hasil penelitian Tateki dkk (2009) beberapa faktor penyebab menjadi gelandangan dan pengemis antara lain 1) Tidak mampu bekerja, 2) Tidak punya modal usaha, 3) Tidak punya keterampilan kerja, 4) Tidak punya pilihan lain, dan 5) lebih suka menjadi gepeng.

3. Karakteristik Gelandangan dan Pengemis

Secara spesifik, karakteristik gelandangan dan pengemis dapat dibagi :

a. Karakteristik Gelandangan

- 1) Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun, tinggal disembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar.
- 2) Tidak mempunyai tanda pengenalan atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas dan liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya.
- 3) Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan bau atau barang bekas.

b. Karakteristik Pengemis

- 1) Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun.
- 2) Meminta minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan, lampu lalu lintas, pasar, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.
- 3) Bertingkah laku untuk mendapat belas kasihan, berpura-pura sakit, merintih dan kadang mendoakan, sumbangan untuk organisasi tertentu.

- 4) Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaaur pada penduduk pada umumnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

Kata pembinaan diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri yaitu “usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik, meningkat, dan mendapatkan manfaat yang positif” (KBBI, 1990: 134). Pada dasarnya pembinaan juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan memiliki manfaat yang positif. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan Miftah (1989:7) bahwa, “pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik”.

Secara lebih luas, pembinaan bukan hanya diartikan sebagai bentuk kegiatan yang dilaksanakan demi tercapainya hasil yang baik namun pembinaan dapat diartikan sebagai pengelolaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan (Manik, 2013: 13). Pengelolaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan dapat berupa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada setiap kegiatan yang dilakukan. Menurut Suparlan (1990: 109) menyatakan bahwa, “pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan penyusunan program koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang semaksimal mungkin”.

Disisi lain, pembinaan dapat diartikan bukan hanya proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatannya melainkan adanya unsur organisasi yang saling terkait dan terkoordinasi sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud dengan baik. Seperti yang dikemukakan oleh Sudjana (2004: 209), yaitu:

“Pembinaan dapat diartikan sebagian rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai

tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. Unsur-unsur organisasi itu mencakup peraturan, kebijakan, tenaga penyelenggara, staf dan pelaksana, bahan dan alat (material), biaya dan perangkat lainnya”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu usaha, proses, atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi yang dilakukan secara keseluruhan melalui unsur organisasi seperti peraturan atau kebijakan, tenaga penyelenggara, staf dan pelaksana, bahan dan alat (material), biaya dan perangkat lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan, hasil yang baik serta maksimal.

2. Bentuk Pembinaan

Pembinaan dibagi menjadi lima bentuk atau tahapan kegiatannya. Menurut B2P3KS (1995: 23-24) menyatakan bahwa, “tahap pembinaan dan bimbingan sosial yaitu pembinaan fisik, bimbingan mental psikologik, bimbingan moral keagamaan, bimbingan social dan pelatihan keterampilan usaha/kerja”. Bentuk pembinaan sendiri meliputi kegiatan yang dilakukan oleh individu, masyarakat atau lembaga terkait dalam kegiatan pelayanan yang diberikan. Bentuk pembinaan yang akan diterapkan pada kampung binaan ini diadaptasi dari beberapa Lembaga pemberdayaan sosial.

Departemen Sosial (2006: 15) menguraikan tahapan pelayanan pelaksanaan dalam rehabilitasi sosial adalah “bimbingan fisik, bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial, bimbingan kecerdasan dan keterampilan kerja, bimbingan belajar kerja atau usaha, bimbingan kesiapan dan partisipasi keluarga, bimbingan kesiapan partisipasi masyarakat, penyaluran, pembinaan lanjut”.

3. Program Pembinaan

Program pelaksanaan pembinaan dibagi berdasarkan 3 pengelompokan usia, berikut pengelompokan usia tersebut:

1) Kelompok usia remaja (usia 19-25 tahun)

Program pembinaan untuk usia remaja diadaptasi dari Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai di Riau. Pelaksanaan pembinaan

yang dilakukan di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai meliputi berbagai kegiatan pelayanan sosial dan bimbingan (Sari, 2018). Kegiatan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Bimbingan fisik

Bimbingan fisik ini dilakukan dalam bentuk kegiatan olahraga, senam bersama, baris-berbaris dan bimbingan kedisiplinan atau apel malam. Kegiatan bimbingan kedisiplinan atau apel malam dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan warga dengan mengabsen warga dan menanyakan kegiatan yang dilakukan warga. Pembinaan perorangan terhadap anak.

b) Bimbingan mental

Bimbingan mental disini ada dua yaitu, bimbingan mental spiritual bertujuan membentuk mental yang kuat dan baik serta memberikan pemahaman yang komprehensif menyangkut konsep ajaran agama, dengan tujuan bisa dijadikan pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Bimbingan mental psikologis berkaitan dengan kegiatan pendampingan terhadap perilaku siswa binaan melalui kegiatan mengobrol/ bercerita dengan pekerja sosial.

c) Bimbingan sosial

Bimbingan social bertujuan untuk meningkatkan kemampuan warga binaan dalam berinteraksi dengan kehidupan sosial dan bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat.

d) Bimbingan Keterampilan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan para warga sebagai aset untuk melaksanakan kegiatan perekonomian secara mandiri nantinya.

2) Kelompok usia dewasa (usia 26-45 tahun)

Program pembinaan untuk usia dewasa diadaptasi dari bimbingan yang diberikan oleh Panti Sosial Bina Barya “Pangudi Luhur” Bekasi dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis

(Zefianningsih dkk, 2019). Program pembinaan untuk usia dewasa meliputi:

a) Bimbingan mental

Bimbingan mental ini dilakukan secara intensif oleh pihak dinas sosial kepada para PMKS. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting guna menumbuhkan rasa percaya diri serta spiritualitas para gelandangan dan pengemis. Karena pada dasarnya mereka memiliki semangat dan rasa percaya diri yang selama ini tersimpan jauh di dalam dirinya. Selain itu mereka juga mempunyai potensi yang cukup besar, hanya saja belum memiliki penyaluran atau sarana penghantar dalam memanfaatkan potensi-potensi tersebut.

Pada saat pertama kali para gelandangan dan pengemis (gepeng) yang tercakup dalam razia, keadaan mereka sangat memprihatinkan, ada yang memasang muka memelas ada juga yang dengan santainya mengikuti semua proses dalam terapi ini, dalam terapi individu dilakukan pengecekan terhadap semua gelandangan dan pengemis (gepeng) satu persatu secara psikis.

b) Bimbingan Kesehatan

Sebelum pihak dinas kesehatan melakukan bimbingan kesehatan, terlebih dahulu para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) diberikan fasilitas penanganan kesehatan yaitu pemeriksaan kesehatan bagi mereka yang sedang sakit. Kemudian kegiatan bimbingan kesehatan dimulai dengan penyadaran tentang pentingnya kesehatan badan atau jasmani. Mulai dari hal kecil seperti pentingnya mandi, gosok gigi dan memakai pakaian bersih. Melihat selama ini kehidupan di jalanan yang sangat keras dan serba tidak sehat, para gelandangan dan pengemis (gepeng) tentu masih merasa kesulitan untuk menerapkan gaya hidup sehat sehingga apa yang diperoleh dalam bimbingan kesehatan tidak diterapkan sepenuhnya dalam kehidupan mereka.

c) Bimbingan ketertiban

Bimbingan ketertiban ini diisi oleh Satpol PP yang dilakukan 1 bulan sekali, dengan tujuan memberikan pengarahan tentang tata tertib lalu lintas, serta peraturan di jalan raya, sehingga warga binaan memiliki pemahaman tentang tata tertib di jalan raya serta taat peraturan lalu lintas.

Dalam proses bimbingan ketertiban ini biasanya pihak dinas sosial mendatangkan narasumber dari Satpol PP atau pihak kepolisian setempat.

d) Bimbingan keagamaan

Bimbingan keagamaan dilakukan secara intensif oleh pihak pembina, guna untuk menguatkan kembali spiritualitas para warga kampung binaan nantinya.

e) Bimbingan Keterampilan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan para warga sebagai aset untuk melaksanakan kegiatan perekonomian secara mandiri nantinya.

3) Kelompok untuk 45 tahun keatas meliputi:

Program pembinaan ini diadaptasi dari program pembinaan yang dilakukan di Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia. Program tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial No. 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia. Adapun program pembinaan tersebut yaitu sebagai berikut (Sulastri & Sahadi, 2019).

a) Program Bimbingan Pemeliharaan Fisik

Program ini berupa pelaksanaan kegiatan berupa melakukan berbagai kegiatan sehari-hari, berolahraga, dan bagaimana menjalani pola hidup sehat. Tujuan dari program ini yaitu diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi lanjut usia agar dapat memiliki jasmani yang sehat maupun melaksanakan kegiatan sehari-hari secara teratur.

b) Program Bimbingan Sosial

Program ini berupa bimbingan yang diberikan kepada lanjut usia dalam menanamkan sikap kebersamaan dan saling menghormati agar dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.

c) Program Bimbingan Mental Spritual

Program ini berupa pelaksanaan ibadah secara teratur. Adapun tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan kepasrahan diri kepada Tuhan. Selain itu program ini juga mengarahkan pada mental para lanjut usia yaitu berupa kesiapan menghadapi masa tua, tidak cepat marah dan tersinggung, ramah, percaya diri, menghindari sikap frustrasi dan berpikir positif.

d) Program Bimbingan Keterampilan

Program ini bertujuan untuk mengisi waktu luang bagi para lanjut usia yang potensial sesuai dengan bakat dan hobi mereka masing-masing seperti menjahit, menyulam, kerajinan tangan, dan berladang. Program ini diharapkan mampu memberikan kebutuhan psikologis bagi para lanjut usia yaitu berupa tumbuhnya rasa berharga dan berguna meskipun memasuki masa tua serta mengisi waktu luang dengan kegiatan yang produktif.

D. Tinjauan Umum Tentang Pemberdayaan Ekonomi

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/ kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk

menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, konsep pemberdayaan ekonomi yang tepat sangat diperlukan. Konsep yang tepat yaitu penerapan edukasi dan pelatihan UMKM kepada warga kampung tunawisma, dengan harapan warga kampung ini dapat mandiri dalam hal ekonomi nantinya. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Maka dari itu, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.

Upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi yaitu pemberian motivasi moril berupa penerangan tentang kewajiban manusia dalam hidupnya yaitu salah satunya bekerja. Bentuk-bentuk motivasi moril yang diberikan yaitu:

a. Pelatihan Usaha

Melalui Pelatihan ini setiap warga diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dan praktik dalam berwirausaha. Tujuan pelatihan ini untuk memberikan wawasan yang lebih dan meningkatkan kemampuan sehingga dapat meningkatkan motivasi warga dalam berwirausaha.

b. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha. Permodalan diberikan sebagai dana awal dengan tujuan sebagai motivasi lebih untuk mengembangkan usaha.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Tambunan, 2009).

Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya (Alma, 2010).

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara (Tambunan, 2002).

Sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan nilai moneter dan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha

mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

b. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- c. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi UMKM (Resalawati, 2011):

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

d. Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar (Tambunan, 2012).

e. Karakteristik Usaha Mikro

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- 2) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- 3) Modal terbatas

- 4) Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- 5) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- 6) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- 7) Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan. Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.

f. Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah

UMKM memiliki peran yang sangat besar terhadap perekonomian nasional dan perlu di tingkatkan dalam pemberdayaannya. Adapaun tujuan pemberdayaan UMKM yang telah tertuang pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan;
- 3) Meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Selain itu juga peran UMKM adalah sebagai penyedia barang dan jasa, penyerap tenaga kerja, pemerataan pendapatan, nilai tambah bagi produk daerah, peningkatan

taraf hidup. Melihat perannya yang begitu besar maka pembinaan dan pengembangan industri kecil bukan saja penting sebagai jalur ke arah pemerataan hasil-hasil pembangunan tetapi juga unsur pokok dari struktur industri Indonesia (Fajrin, 2015).

Berdasarkan uraian di atas, berikut merupakan pertimbangan dalam menentukan jenis pelatihan UMKM yang akan diterapkan kepada warga yang berada pada usia produktif, yaitu:

- a. Produk atau jasa yang dihasilkan memiliki peluang yang baik untuk dikembangkan
- b. Dapat meningkatkan daya tarik pengunjung
- c. Bersifat praktis

Atas dasar pertimbangan diatas, ditentukan beberapa jenis edukasi dan pelatihan UMKM dengan tujuan tunawisma yang selesai dibina nantinya dapat menggunakan ilmu dan keterampilan yang diperoleh sebagai aset dalam meningkatkan perekonomian. Jenis edukasi tersebut dibagi menjadi dua berdasarkan jenis kelamin, yaitu:

- a. Edukasi UMKM untuk Laki-laki;
 - 1) *Workshop* Meubel
 - 2) *Workshop* Perbengkelan
 - 3) *Workshop* Las
- b. Edukasi UMKM untuk Perempuan;
 - 1) *Workshop* Tata Rias
 - 2) *Workshop* Tata Busana
 - 3) *Workshop* Tata Boga